

BAB II

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI BERBAGAI NEGARA KORBAN

Politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari refleksi politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal negara tersebut. Sebuah politik luar negeri suatu negara juga di iringi atau di sesuaikan dengan perkembangan situasi internasional. Begitu pula dengan politik luar negeri berbagai negara korban seperti Iran, Irak, dan Suriah dimana politik luar negeri negara mereka juga tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi sikap diplomatik, cara pandang negara, serta cara negara untuk memposisikan negaranya di fora internasional.

A. Politik Luar Negeri Berbagai Negara Korban

1. Politik Luar Negeri Suriah

Suriah merupakan salah satu negara yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan pada saat ini sedang mengalami konflik bersenjata internal (Pukan, 2013). Bashar merupakan anak dari presiden Suriah sebelumnya yaitu Hafez al Assad.

Sepeninggalnya Hafez al Assad, Bashar al Ashad melanjutkan jejak politik ayahnya dan dipilih sebagai pemimpin Suriah setelah meninggalnya ayahnya. Masa kepemimpinan Bashar dan Hafez tidaklah jauh berbeda, pada masa kepemimpinan Bashar pun Suriah masih tetap menjalin hubungan baik dengan Iran, Rusia, China, Korea Utara dan beberapa negara Amerika Latin yang menentang Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya. (Muhammad M. , 2016)

Selama memimpin Suriah, Bashar banyak menerapkan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan negaranya. Salah satunya adalah kebijakan luar negeri,

dimana kebijakan luar negeri yang diambil Bashar dimasa kepemimpinannya ia akan mengupayakan alasan proses damai negara Arab dengan Israel. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya militer Suriah di Lebanon, serta pada masa kepemimpinan Bashar ia akan mengupayakan hubungan Suriah dengan dunia, baik dari sektor regional dan Internasional. (Muhammad M. , 2016)

Pada masa kepemimpinan Bashar digadag-gadag akan adanya perbaikan dibidang ekonomi dan politik untuk Suriah. Dimana masyarakat menaruh harapan sepenuhnya kepada Bashar untuk dapat memperbaiki sistem ekonomi, politik dan birokrasi di Suriah. Dalam kebijakan politik, Bashar mewarisi sistem politik satu partai yang di dominasi oleh militer yang beraliran sekte Alawi. Dimana sistem ini terdiri dari pemerintah resmi dan pemerintah bayangan. (Muhammad M. , 2016)

2. Politik Luar Negeri Iran

Iran merupakan negara yang sangat bergantung pada SDA seperti minyak dan gas. Seiring berjalannya waktu Iran sadar apabila negara tersebut tidak bisa terus menerus bergantung pada persediaan minyak dan gas yang dimilikinya. Apabila sumber daya tersebut digunakan terus menerus tentu saja akan habis dengan seiringnya waktu. Kebutuhan listrik di Iran sendiri mengalami jumlah kenaikan dengan bertambahnya jumlah populasi dinegaranya. Diprediksi pada tahun 2025 kebutuhan listrik di Iran akan mencapai 6 sampai 8 persen setiap tahunnya dengan jumlah populasi mencapai 100 jiwa.dengan itu pemerintah melakukan pengalihan sumber energi utama melalui pengembangan energi nuklir ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik Iran. (Saragih, 2017)

Dengan adanya pengembangan nuklir di Iran tentu saja membuat situasi yang tegang pada dunia internasional. Dengan adanya pengembangan nuklir tersebut membuat dunia internasional berfikir negatif tentang Iran. Iran dianggap memiliki niat yang buruk dalam pengembangan nuklir dinegaranya. Walaupun Ahmadinejad telah menyampaikan bahwa pengembangan nuklir di Iran sendiri untuk tujuan damai dan tidak memiliki ancaman bagi berbagai belah pihak. (Saragih, 2017)

Upaya yang dilakukan Iran untuk mengubah pemikiran Internasional tentang negaranya tidak direspon baik dengan Amerika. Justru Amerika melakukan upaya penekanan agar Iran menghentikan program nuklirnya, Amerika juga mencari sekutu untuk memberikan sanksi kepada Iran untuk melemahkan perekonomiannya (Saragih, 2017). Dengan tindakan yang dilakukan Amerika membuat hubungan Iran dengan negara Barat menjadi lebih tegang. Namun ketika Iran dipimpin oleh Hassan Rouhani ketegangan antara negara barat dengan Iran menjadi tidak menegang lagi yang disebabkan dari janji-janji yang diucapkan oleh Hassan Rouhani.

Hassan Rouhani sendiri merupakan seorang ulama Iran yang lahir di Sorkheh provinsi Semnan pada 12 November 1948, Hassan merupakan sosok yang lahir dan tumbuh dari keluarga yang taat beragama. Hassan merupakan seorang pengacara akademisi dan diplomat sebelum ia mencalonkan diri sebagai Presiden pada 7 Mei 2013. Pada masa kampanyenya ia terus mengutarakan bahwa ia akan mempersiapkan suatu piagam yang beristilah “piagam hak sipil” serta akan memulihkan perekonomian dan meningkatkan hubungan diplomatik Iran dengan negara barat apabila ia terpilih sebagai Presiden Iran.

Setelah terpilihnya Hassan sebagai Presiden Iran, tampak jelas adanya perubahan dan perkembangan

positif dibidang politik luar negeri Iran. Hal tersebut ditandai dengan kefokusannya Hassan terhadap hak-hak sipil yang dimana hak sipil tersebut tidak dipenuhi diorde pemerintahan Iran sebelumnya.

Dalam bidang politik luar negeri Rouhani berjanji akan mengupayakan peredamian atas ketegangan Barat dengan Iran yang menyangkut tentang program nuklir. Janji tersebut pun ditepati oleh Rouhani dengan kehadirannya pada tanggal 26 September 2013 dimana terjadi pertemuan dengan negara-negara P5+1 yang terdiri dari China, AS, Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia. Pertemuan tersebut dilakukan disela-sela sidang umum (SU) PBB di New York dimana pertemuan tersebut berfokuskan pada penyelesaian masalah program nuklir Iran yang masih terkatung-katung.

Kebijakan luar negeri Iran berbeda dengan negara-negara lain dimana negara lain akan berfokuskan kepada kepentingan ekonomi namun Iran berfokuskan kepada keamanan nasional. Iran berusaha untuk memasok semua barang pokok rakyat sendiri dari pada harus bergantung pada perdagangan luar negeri. Hal tersebut dianggap para pemerintah Iran sebagai kemandirian dalam bidang ekonomi dimana dengan kemandirian ekonomi tersebut akan memungkinkan Iran untuk lebih efektif memerangi kapitalisme dan imperialisme.

3. Politik Luar Negeri Irak

Irak merupakan negara yang bisa dikatakan ancaman bagi banyak negara pada masa kepemimpinan Saddam Hussein. Saddam Hussein merupakan salah satu pemimpin ditraktor terkemuka di dunia. Saddam Hussein memimpin Irak selama 24 tahun dari tahun 1979 sampai 2003. (Gunawan, 2018)

Dibawah kepemimpinan Saddam Hussein, negara Irak maju dalam segi militernya hingga membuat ancaman bagi berbagai negara lain. Namun keadaan rakyat pada masa kepemimpinan Saddam seperti

dalam kurungan penjara. Background keluarga Saddam Hussein seperti ibu dan kakaknya yang bekerja di bidang militer tak heran apabila Hussein menguasai bidang militer. (Gunawan, 2018)

Hussein diangkat dari partai Baath, dimana ia bergabung menjadi kader partai Baath setelah ia lulus dari Universitas Baghdad. Hussein juga sempat dipenjarakan karena ikut serta dalam pembunuhan Perdana Menteri Abdel Karim Kassem sebelum ia menyalonkan diri sebagai presiden Irak. Hussein sendiri mengambil alih kursi presiden Ahmed Hassan al-Bakr. (Gunawan, 2018)

Selama masa kepemimpinannya, Hussein mulai melancarkan taringnya di dunia internasional. Tahun 1988 Hussein menyatakan perang melawan Iran dalam rangka ambisi untuk kepentingan ekspansi kekuasaan. Pada tahun 1990, Hussein pun juga melancarkan invasi ke Kuwait. Tindakan-tindakan yang dilakukan Irak pada masa kepemimpinan Saddam Hussein membuat PBB geram dan menjatuhkan sanksi kepada Irak. (Gunawan, 2018)

Selama 24 tahun menjabat, Hussein kerap menyingkirkan lawan politik dengan cara kekerasan. Rangkaian pembunuhan pun sering dilakukan oleh Hussein, seperti contohnya pemantaian 148 warga Dujail pada tahun 1982. Penguasa Irak selama 24 tahun harus berakhir dengan tragis. Bahkan ia harus mengakhiri hidupnya secara mengenaskan. Hussein sendiri dieksekusi tepat pada Hari Raya Idul Adha. Sebelumnya tekanan dari dalam maupun luar negeri belum bisa menjatuhkan Saddam. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa peristiwa pengrobohan patung Saddam Hussein yang dipropokatori oleh AS dapat menjatuhkan Sadddam yaitu dengan peristiwa eksekusi gantung untuk Saddam di Baghdad (Anwar, 2013)

Setelah jatuhnya masa kepemimpinan Saddam, Irak dipimpin oleh Ghazi Mashal Ajil al-Yawer. Namun masa kepemimpinan itu tidak lama, pada tahun 2005 Irak dipimpin oleh Jalal Talabani. Jalal Talabani merupakan pemimpin Persatuan Patriotik Kurdistan (PUK). Talabani merupakan pemimpin perjuangan hak-hak Kurdi dan pejuang demokrasi di Irak. Talabani dikenal sebagai pembawa perdamaian di negara Irak. Ia memiliki peran penting dalam penyatuan negara-negara setelah terjadinya masa dimana pasukan internasional pimpinan AS menyerang Irak. (Hertanto Soebijoto, 2017)

4. Politik Luar Negeri Sudan

Sudan merupakan negara yang telah mengalami perubahan pemerintahan dan administrasi dari bulan Juli 2011, perubahan tersebut terjadi akibat dari pemisahan antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Sekarang negara Sudan hanya memiliki 15 negara bagian karena 8 negara bagian masuk kedalam negara baru di Sudan Selatan.

Tidak hanya perubahan dibidang pemerintahan dan administrasi, status dari pemerintah Sudan sendiri juga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2005-2011 pemerintah Sudan lebih bersifat transisi koalisi yang terdiri dari National Congress Party (NCP) dan Sudan People's Liberation Movement (SPLM). Sedangkan pada 9 Juli 2011 tepat pada kemerdekaan Sudan Selatan, pemerintah Sudan yang terdiri dari NCP dan sejumlah partai oposisi seperti SPLM sudah berpindah ke Sudan Selatan.

Pada tanggal 15 Desember 2011, Pemerintahan Sudan membentuk pemerintahan baru yang terdiri dari 30 menteri Federasi dan 30 menteri Negara yang diperbantukan disetiap kementerian. Selain itu, Pemerintahan Sudan juga mengangkat 10 Asisten dan Penasihat Presiden. Masa jabatan atau masa bakti

pemerintahan baru tersebut akan berlangsung sampai tahun 2015.

Adanya pemisahan antara Utara dengan Selatan tentunya sangat merugikan Sudan, baik dari segi ekonomi maupun politik dan keamanan Sudan sendiri. Dalam segi ekonomi Sudan mengalami inflasi sebesar 18% pada bulan November 2011. Dalam bidang politik dan keamanan sendiri Sudan yang awalnya merupakan wilayah yang mayoritas diduduki oleh pendukung dari SPLM, Blue Nile State dan Kordofan Selatan justru dari bulan Juni 2011 wilayah ini menjadi bergejolak dan muncul banyak pemberontak yang dilakukan oleh mantan pendukung SPLM (SPLM sektor utara). (kemlu.go.id)

5. Politik Lur Negeri Somalia

Somalia merupakan bagian dari negara Afrika yang terkenal atau tersorot karena kekerasan, perebutan sumber daya alam, sengketa perbatasan, irredentisme, kekacauan, budaya konflik dan kemiskinan. Somalia merupakan negara yang tidak memiliki otoritas pemerintah yang terakui, Somalia juga tidak memiliki mata uang nasional atau tidak memiliki satupun ciri-ciri dari negara yang berdaulat. (BBC NEWS, 2018) Otoritas secara de facto berada di tangan pemerintah yg tidak diakui, yaitu seperti Somaliland, Puntland dan gembong militan kecil yang saling bermusuhan, dimana ketiga dari mereka memimpin pemerintahan oposisi.

Dengan hal yang telah terjadi dan yang berlangsung di Somalia sendiri membuat PBB menyatakan laporan tahunan tahun 2004 bahwa Somalia merupakan salah satu failed state di negara dunia ketiga. Selain itu Amerika Serikat juga menyebut bahwa Somalia merupakan negara sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia, karena karakteristik informalitas pemerintah dan absensi hukum di Somalia merupakan tempat yang cocok

untuk persembunyian para teroris. (Cornalia D. Rainintha Siahaan)

Somalia juga mengalami beberapa infomalitas pemerintahan, mulai dari junta militer, figur ketokohan Siad Barre yang diktator, sampai dengan rezim ditaktor tumbang lalu diganti dengan siklus perebutan power oleh berbagai klan dan aliran politik. Namun sayangnya semua perubahan pemerintahan yang dilakukan oleh Somalia adalah mimpi buruk untuknya. Dan yang akhirnya sampai saat ini pemerintahan Somalia berbentuk TFC (Transitional Federal Government), dimana TFC merupakan satu-satunya pemerintahan yang terlegitimasi oleh PBB dan dunia internasional. (Cornalia D. Rainintha Siahaan)

Somalia bertahan hidup tanpa hukum, pengawasan dan pemerintahan yang sah, walaupun Somalia sempat mengadakan pemilu dalam sistem pemerintahannya, hal tersebut tidak membuat bagian dari perbedaan etnis dan klan terepresentasikan atau bersedia direpresentasikan dipemerintahan resmi. (Cornalia D. Rainintha Siahaan)

6. Politik Luar Negeri Yaman

Politik luar negeri Yaman dibawah kepemimpinan Shaleh dicirikan dengan “positive neutrality” dan persatuan Arab. Dibawah kepemimpinan Shaleh, Yaman menjalin hubungan baik dengan Arab Saudi dan juga negara-negara Barat. Pada masa kepemimpinan Shaleh, Shaleh berusaha untuk mempertahankan hubungan antara Yaman dengan Uni Soviet yang sempat pecah pada tahun 1991. (Nations Encyclopedia, 2003)

Hubungan baik antara Arab dengan Yaman terbukti pada keterlibatan Yaman dalam mendukung persatuan Arab. Yaman juga membantu para pejuang Palestina di Lebanon dengan pengiriman sukarelawan dari Yaman. (Nations Encyclopedia, 2003)

Sejak tahun 2001, Yaman telah memperketat keamanan negaranya baik di perbatasan atau yang lainnya. Pada tahun itu Yaman juga telah memperbaiki prosedur visa di negaranya. Serta hubungan baik antara Yaman dengan Amerika Serikat nampak terlihat jelas pada tahun 2001 dimana kedua negara tersebut melakukan kerjasama dibidang intelijen, penegakan hukum dan militer. Serta sejak tahun 2002 Amerika telah memberikan banyak bantuan untuk Yaman. (Nations Encyclopedia, 2003)

7. Politik Luar Negeri Libya

Semenjak kemerdekaan Libya, Libya telah mengalami tiga kali perubahan dalam bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk Monarki (Kerajaan), Republika, dan yang terakhir Sosial Republik. Dalam sejarah Libya selama 58 tahun hingga sekarang politik Libya sering mengalami pasang surut. Pada awalnya pada masa kepemimpinan Raja Idris, Libya memiliki hubungan baik dengan negara Barat seperti Inggris dan Amerika. (Mariansyah, 2017)

Namun, pada masa kepemimpinan Muammar Gaddafi dimana ia menginginkan kiblat politik negaranya ke Uni Soviet. (Eljahmi, 2006) Dengan adanya perubahan sikap politik yang diambil oleh Muammar Gaddafi tentu ia menerima konsekuensinya yaitu dengan mendapatkan permusuhan dari Inggris dan Amerika. Selain perubahan arah politik Libya dibawah keprimpinan Gaddafi, faktor lain pendorong keretakan hubungan Libya dengan negara Barat juga diakibatkan karena aksi-aksi terrorisme dan penindasan terhadap kaum minoritas yang dilakukan oleh Libya.

Selain itu Libya juga kerap mendapati tuduhan-tuduhan dari dunia internasional, mulai dari aksi pengeboman pesawat Lockerbe, pembunuhan polisi Inggris dari gedung kedutaan Libya di London, mendukung terrorisme dan aksi revolusi negara-negara di Afrika dan Asia, mengembangkan proyek senjata

biologi dan kimia pemusnah masal, sampai dengan pembelaan terhadap Palestina yang nyatanya merugikan Israel. (Eljahmi, 2006)

B. Sejarah Politik Luar Negeri Berbagai Negara Korban Terhadap Amerika

1. Politik Luar Negeri Suriah Terhadap Amerika

Sebelum memasuki tahun 2000, Suriah dengan Amerika Serikat memiliki hubungan yang cukup baik. Pada tahun 1990-2001 Suriah dengan Amerika Serikat bekerjasama untuk menyelesaikan beberapa masalah regional. Namun pada tahun 2000 ketika Bashar al-Ashadd terpilih sebagai presiden Suriah hubungan antar kedua negara tersebut mulai merenggang. Kerengangan antara kedua negara tersebut tidak pernah terprediksi, terlebih melihat background dari Bashar sendiri mulai dari pendidikan dimana Bashar pernah mengenyam pendidikan di London tentunya ia lancar berbahasa Inggris dan juga memiliki gaya hidup yang kebarat-baratan. Dan juga pada masa kepemimpinan Bashar, internet mulai muncul di Suriah dan juga hak berpendapat untuk masyarakat pun mulai diterapkan pada masa kepemimpinan Bashar. (Zisser, 2005)

Kerengangan antar kedua negara tersebut dimulai pada tahun 2003, dimana saat Amerika menginvasi Irak. (Matondang, 2012) Dimana invasi AS ke Irak waktu itu ditentang keras oleh Suriah. (Denny Armandhanu, 2011) Penentangan dari Suriah berujung pada berbagai tudingan yang ditudingkan AS ke Suriah. (Matondang, 2012) Mulai dari tudingan bahwa Suriah memberikan bantuan kepada pejabat Irak yang melarikan diri, (Denny Armandhanu, 2011) Suriah bekerjasama dengan Iran dalam bidang pengembangan nuklir dan juga hubungan dekat antara Suriah dengan Hizbullah dan Hamas diduga AS bahwa Suriah bekerjasama dengan jaringan teroris.

Banyaknya permasalahan-permasalahan antar kedua negara tersebut menjadi sebab dijatuhkannya sanksi ekonomi oleh AS terhadap Suriah pada tahun 2003, pada saat AS dipimpin oleh George W. Bush. Sanksi ekonomi pertama yang dijatuhkan oleh AS terhadap Suriah adalah dengan pemotongan pipa minyak. Dimana pipa minyak tersebut merupakan pipa yang menghubungkan jalur minyak antara Suriah dengan Irak. Pipa minyak tersebut merupakan penghasilan utama masyarakat Suriah dengan penghasilan mencapai 200.000 barel per hari. (Matondang, 2012)

Sanksi tersebut berlaku pada 12 Desember 2003, dimana ada tiga kriteria sanksi yang diberikan AS terhadap Suriah, diantaranya:

1. Larangan ekspor AS ke Suriah (Berdasarkan the 2003 Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Act/SALSA)
2. Larangan terhadap pejabat Suriah dan golongan-golongan masyarakat Suriah untuk mengakses sistem keuangan finansial AS serta larangan pengembangan senjata pemusnahan masal dan bekerjasama dengan al-Qaeda, Taliban atau Osama bin Laden, dan
3. Pemberhentian Commercial Bank of Syria pada tahun 2006(berdasarkan USA Patriot Act) (Sharp, 2010)

Dengan sanksi ekonomi yang diberikan AS terhadap Irak, Bashad merespon dengan menunjukkan sikap yang tegas dan seolah-olah ia tidak memperdulikan jatuhnya sanksi ekonomi tersebut. Bashad mengatakan apabila dirinya dan juga seluruh masyarakat Suriah tidak takut atas sanksi ekonomi yang diberikan oleh AS. (Matondang, 2012)

Namun selang waktu yang tidak cukup lama, Bashad mulai melunak. Dimana ia mulai memperbaiki

hubungan antara AS dengan Suriah. Ia mulai bersedia memenuhi permintaan AS untuk Suriah. Walaupun Bashad mulai memperbaiki hubungan Suriah dengan AS, tidak berarti bahwa hubungan antara Suriah dengan Iran dan juga hubungan Suriah dengan Hizbullah memburuk. Suriah tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. (Matondang, 2012)

Kemenangan Hizbullah dalam perang pada tahun 2006 membuat kedudukan Suriah semakin menguat. Tindakan Suriah waktu itu membuat AS yang dipimpin oleh Bush menjadi geram dan membuat pengetatan sanksi ekonomi untuk Suriah pada tahun 2006. (El-Hokayem, 2007) Pengetatan sanksi tersebut berupa penutupan transaksi properti milik penduduk Suriah dan juga tentunya untuk kalangan keluarga Bashad.

Pada masa AS dipimpin Obama, politik luar negeri AS berubah. Dimana pada masa Obama, ia menekankan konsep smart power dimana smart power ini komponen dari soft power dan hard power. Dan juga Obama ingin merubah citra AS yang agresif dengan wilayah Timur Tengah pada masa kepemimpinan Bush dalam kebijakan War on Terrornya menjadi lebih efektif. Dimana AS dengan misi kemanusiaannya pada masa Obama berjanji akan mengakhiri konflik Suriah melalui jalur militer. (Adi, 2018)

Di Suriah barat laut, AS memberikan bantuan berupa stabilisasi untuk mendukung oposisi Suriah, dewan lokal dan organisasi masyarakat sipil untuk melawan pengaruh kelompok Al-Qa'da (AQ) dari tahun 2012. Di Suriah barat daya, AS memberikan bantuan stabilisasi untuk meningkatkan pengaturan de-eskalasi. Bantuan tersebut diantaranya seperti pembangunan kapasitas untuk entitas pemerintah lokal. Di Suriah timur laut, AS bekerjasama dalam Koalisi Global untuk mengalahkan ISIS. (U.S. Department of State Diplomacy In Action, 2018)

2. Politik Luar Negeri Iran Terhadap Amerika

Hubungan bilateral antara Iran dengan Amerika Serikat sudah terjalin sejak tahun 1957, terutama dalam hal nuklir. Kedua negara memiliki kepentingan nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Dimana Amerika Serikat menjalin hubungan dengan Iran bertujuan untuk menanamkan hegemoni dikawasan Timur Tengah yang merupakan kawasan kaya akan hasil minyaknya. Sedangkan Iran memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari negara-negara barat, dimana waktu itu negara-negara barat memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Berikut sejarah dinamika hubungan Iran dengan Amerika Serikat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1957 untuk pertama kalinya Iran menandatangani perjanjian kerjasama di bidang energy nuklir untuk keperluan sipil dengan Amerika Serikat. Perjanjian kerjasama tersebut berisikan tentang pemberian bantuan dari Amerika Serikat berupa fasilitas nuklir untuk Iran sebesar 5 megawatt guna untuk kepentingan penelitian. Fasilitas nuklir tersebut dinamakan Tehran Research Reactor. (Haas, 2006) Kerjasama antara Iran dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kedua negara tersebut menjalin hubungan baik.

Bantuan Tehran Research Reactor kembali diberikan Amerika Serikat untuk Iran pada tahun 1960. Supply energy nuklir ke Iran dengan program US Atom for Peace sendiri didukung oleh Dwight D. Eisenhower dimana waktu itu ia merupakan presiden Amerika Serikat. Dengan program US Atom for Peace, Amerika Serikat menjamin kepada dunia internasional bahwa proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Iran tidak akan membahayakan berbagai belah pihak. Kegiatan ini dilakukan untuk keperluan sipil dan penelitian.

Dengan pemberian research reactor oleh Amerika Serikat menjadi cikal bakal bagi Iran untuk membentuk organisasi atom pertamakali dinegaranya yaitu AEOI (Atomic Energy Organization of Iran). Selain bantuan dibidang teknis, Amerika Serikat juga memberikan jalan bagi Iran untuk mengembangkan program nuklirnya yaitu berupa perjanjian dan perundingan mengenai nuklir.

Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Non-Proliferation Nuclear atau NPT (Non Proliferation Treaty). Dimana perjanjian ini mempermudah Iran dalam mengembangkan program nuklir untuk kepentingan damai atau kepentingan sipil dikawasan Timur Tengah. (Aji, 1975)

Setelah hubungan baik yang berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat, pada tanggal 13 Maret 1969 Amerika Serikat memutuskan untuk memperpanjang kerjasama diantara kedua negara tersebut untuk jangka 10 tahun kedepan. Hubungan bilateral antara kedua negara tersebut sangat terlihat ketika diundangnya Shah Reza Pahlevi ke Washington pada bulan November 1977. Setelah berakhirnya kepemimpinan Dwight D. Eisenhower, Jimmy Carter tetap meneruskan hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Iran.

Kedekatan Iran dengan Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Shah Reza yang lebih cenderung pro dengan barat, membuat masyarakat Iran tersadar bahwa perlunya menjunjung tinggi kembali prinsip agama yang dulu dianut masyarakat Iran sebelum kepemimpinann Shah Reza. Keinginan ini memuncak pada bulan Februari 1979, dimana pada tahun ini terjadi pergolakan di Iran dan tergulingnya rezim Shah Reza Pahlevi yang kemudian masa setelah penggulingan tersebut dikenal sebagai masa Revolusi Islam Iran. Masa revolusi ini dipimpin oleh Imam Khamenei atau Ayatullah Khamenei.

Gaya kepemimpinan Ayatullah berbeda dengan gaya kepemimpinan Shah Reza, dimana Ayatullah cenderung menutup diri dari campur tangan Amerika Serikat, selain itu Iran juga memberikan pernyataan negative mengenai Amerika Serikat. Pada tahun 1979 Amerika Serikat memutuskan untuk menarik hubungan diplomasinya dengan Iran setelah adanya aksi negative dari Internal Iran, yaitu pada bulan November 1979. Dimana pada saat itu terdapat 52 warga negara Amerika Serikat dan diplomat dari Amerika Serikat disandera selama 444 hari oleh mahasiswa-mahasiswa militant Iran yang pada saat itu menduduki kedaulatan Amerika Serikat di Teheran. (Viva.co.id, 2010)

Aksi tersebut direspon Amerika Serikat dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan kemudian Amerika Serikat mengambil langkah untuk menarik semua fasilitas dan bantuan yang pernah diberikan Amerika Serikat untuk Iran. (Nti Building A Safer World, 2018)

Pada tahun 1980 Iran dilanda kehancuran, mulai dari infrastruktur dan perekonomiannya. Akibat dari kehancuran tersebut Iran memutuskan untuk menghentikan proliferasi nuklirnya dan berusaha untuk memperbaiki kondisi Iran yang sedang mengalami krisis pasca perang Iran-Irak pada tahun itu. Walaupun kehancuran telah melanda Iran namun tidak membuat Ayatollah untuk memberhentikan program nuklirnya secara total. Diam-diam Ayatollah mendekati Jerman untuk membangun kembali reactor Busher yang hancur selama perang Iran-Irak.

Dari tahun ketahun setelah kehancuran Iran, Iran terus berusaha untuk menjalin dengan berbagai negara dalam hal nuklir. Seperti perjanjian antara Iran-China yang berisikan kerjasama untuk membangun reaktor produksi plutonium, dua reaktor dan fasilitas konversi uranium. Kemudian perjanjian antar Iran-Argentina dimana kerjasama tersebut mengenai pengayaan

uranium dan produksi air berat. Lalu perjanjian antara Iran-Russia yang berisikan kerjasama dalam bidang pembangunan reaktor air berat. (Nti Building A Safer World, 2018)

Dengan melihat kerjasama yang dilakukan Iran dengan berbagai negara dalam pengembangan program nuklir Iran, Amerika Serikat segera mersepon hal tersebut dengan mengajak Uni Eropa untuk memberikan sanksi bagi Iran. Bill Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ia menginstruksi embargo perdagangan dan melarang para investor Amerika untuk menginvestasikan uangnya di Iran. Bill Clinton mengatakan apabila kebijakan ini dapat menekan perkembangan investasi di Iran dan mencegah Iran untuk mensupport teroris internasional dan menghentikan pembuatan senjata pemusnahan masal.

Pada 8 Januari 1998 Presiden Iran Muhammad Khatami mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Iran akan membuka dialog mengenai permasalahan nuklirnya.

Pada tahun 2002 Iran tidak berhenti untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengolah uranium. Hal ini tentu saja mendapat kecaman keras dari presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush. Iya mengancam akan menyerang Iran dengan kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat apabila Iran tidak menghentikan pengembangan nuklirnya. Amerika Serikat pun juga mengajak negara-negara Eropa dan juga PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran. Melihat dampak dari sanksi embargo yang mulai mempengaruhi perekonomian Iran akhirnya Iran mulai membuka dialog diplomasi yang dilakukan pada tanggal 7 November 2004, dimana Iran melewati 22jam untuk bernegosiasi.

Pada tahun 2005 Iran melakukan aktifitas konversi uranium di Eshfahan. Kegiatan ini tentu saja

kembali mendapatkan respon dari Amerika, dimana Amerika dan sekutunya menuding bahwa Iran mencoba membuat bom nuklir. Namun tudingan tersebut tidak menghentikan Iran untuk menghentikan konversi uraniumnya. Iran pun terus memproduksi uraniumnya, hal ini pun akhirnya ditanggapi oleh PBB dan dewan keamanan PBB setuju apabila Iran harus diberikan sanksi atas pengembangan nuklirnya.

Pada masa kepemimpinan Obama pun ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran masih terus berlanjut. Berbagai serangan dari Amerika untuk Iran pun terus dilakukan, mulai dari serangan Cyber dan serangan yang lainnya. (Sanger, 2012) Bahkan Obama pun mengeluarkan sanksi baru untuk Iran. Sanksi tersebut meliputi embargo pembelian senjata militer, perdagangan dan transaksi finansial yang digunakan oleh para pegawai revolusioner Islam Iran yang bertugas mengontrol program nuklir Iran.

Namun pada tahun 2013 hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran mengalami perubahan yang signifikan. Diaman waktu itu Iran dipimpin oleh Hassan Rouhani. Dimana hal ini ditandai dengan Hassan menelfon Obama ketika berkunjung ke forum PBB di New York. Dimana komunikasi ini pertama kali terjadi setelah konflik antar kedua negara tersebut tak kunjung usai.

Hubungan baik tersebut berlanjut dan memberikan sinyal bahwa Iran akan membuka dialog untuk segera menyelesaikan permasalahan nuklirnya sesuai dengan janji Hassan pada masa kampanyenya. Hal ini dbuktikan dengan kehadiran Iran pada tanggal 24 November 2013 dalam perundingan dengan negara-negara P5+1 Di Geneva, Switzerland. (The JCPOA Timeline)

Walaupun kedua negara ini mengalami dinamika hubungan dalam bidang politik kurang stabil, ternyata kedua negara ini juga melakukan hubungan kerjasama

dibidang olahraga. Sejak tahun 2009, kedua negara ini menjalin hubungan dibidang olahraga yaitu pada olahraga gulat. Dimana diketahui apabila olahraga gulat merupakan olahraga yang sangat populer di kedua negara tersebut. (Tempo.co, 2009)

Pada bulan Maret 2009, sebuah tim gulat dari Amerika Serikat berangkat menuju Iran untuk mengikuti perlombaan turnamen Takhti Cup yang diselenggarakan pada 12-13 Maret 2009. Olahraga gulat dan sepakbola sendiri merupakan olahraga yang terfavorit di kedua negara tersebut. Persengketaan masalah nuklir pada tahun itupun tidak menutup hubungan baik antar kedua negara ini dibidang keolahragaan. Dan tim gulat dari Amerika Serikat pun tetap memberangkatkan diri untuk mengikuti turnamen di Iran. (Tempo.co, 2009)

3. Politik Luar Negeri Irak Terhadap Amerika

Hubungan luar negeri antara Irak dengan Amerika Serikat sudah terjalin sejak lama. Lamanya hubungan yang terjalin diantara kedua negara tersebut terjadi berbagai dinamika dalam proses pembentukan hubungan tersebut. Diantaranya ada masa dimana Irak dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang sangat dekat, kedekatan itu terjadi ketika adanya perang antara Iran dengan Irak. Dimana waktu itu Amerika Serikat menjadi sekutu dari Irak. Tapi, disisi lain ada juga masa dimana kedua negara tersebut saling bermusuhan. Permusuhan tersebut terjadi saat meledaknya Perang Kuwait. Dalam perang tersebut Amerika Serikat justru menyerang Irak dan memukul mundur Irak serta mengusir pasukan Irak untuk keluar dari Kuwait.

Irak merupakan negara yang selalu menjadi fokus politik luar negeri Amerika Serikat. Hubungan antar kedua negara tersebut sangat menyita perhatian dunia internasional. Permusuhan anantara Irak dengan

Amerika Serikat tidak hanya berhenti pada perang Kuwait saja. Dimana pada masa kepemimpinan George, George membuat kebijakan untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. (Jatmika, 2014) Waktu itu Irak ada pada masa kepemimpinan Saddam Hussein, dimana Invasi yang dilakukan Amerika Serikat kepada Irak sendiri sangat menyita perhatian dunia internasional.

Tragedi Invasi Irak sendiri diawali dengan adanya tragedi atau peristiwa pada tanggal 11 September 2001. Pada waktu itu Amerika Serikat dilanda tragedi, dimana Amerika Serikat diserang oleh teroris. Teroris berhasil membajak 4 pesawat udara untuk menyerang bangunan-bangunan bersejarah di Amerika Serikat. Namun pada kasus ini hanya 3 pesawat udara yang berhasil menyerang bangunan-bangunan bersejarah di Amerika Serikat.

Diantarannya, 2 pesawat udara berhasil menabrak Menara World Trade Center (WTC). Dimana menara tersebut dianggap sebagai simbol dari kapitalis. Lalu 1 pesawat udara berhasil menabrak dan merusak Gedung Pentagon. Dimana gedung ini dijuluki sebagai gedung teraman sedunia.

Aksi pada tanggal 11 September 2001 ini diketahui aksi dari kelompok teroris negara Timur Tengah. Dimana aksi ini diketahui dipimpin oleh Osama bin Laden yang bernama Al-Qaeda. Presiden Bush sendiri menduga bahwa dibalik aksi ini terdapat Saddam Hussein yang ikut serta terlibat.

Dugaan Bush terhadap Hussein membuat, Bush membuat kebijakan yang sangat mengagetkan dunia internasional yaitu kebijakan untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Invasi terhadap negara Irak pada tahun 2003 diberikan kode "Operasi Pembebasan Irak". (Conetta, 2003) Dengan invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak menjadi puncak perselisihan antara kedua negara ini.

Tanggal 9 April 2003 perang antara Irak dengan Amerika Serikat dinyatakan berakhir. Berakhirnya perang tersebut ditandai dengan dikuasainya kota Baghdad oleh Amerika Serikat. Kemenangan Amerika Serikat tersebut sekaligus menandai bahwa rezim Saddam Hussein di Irak telah berakhir. Setelah berakhirnya kepemimpinan Hussein, dari tahun 2005 posisi kepresidenan diserahkan kepada Perdana Menteri.

Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak juga memberikan dampak yang positif. Dimana pasca terjadinya invasi di Irak, Amerika Serikat menerjunkan para tentaranya untuk memberikan pelatihan militer terhadap tentara Irak. Selain itu, karena invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak diduga juga bertujuan atas faktor ekonomi yaitu penguasaan ladang minyak. Namun, dari tujuan tersebut Irak juga mendapatkan beberapa keuntungan seperti, adanya perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Irak untuk mengolah minyak di Irak secara optimal, dan pemanfaatan teknologi perminyakan yang tepat. Dengan pembelajaran mengenai pemanfaatan teknologi minyak, membawa Irak berada diposisi kelima didunia sebagai negara dengan pemilik cadangan minyak terbesar dan berada di posisi ketiga di Timur Tengah. (Wulandari, 2015)

Pada masa kepemimpinan Barack Obama, Irak masih menjadi negara yang difokuskan dalam politik luar negeri negara Amerika Serikat. Namun dalam masa kepemimpinan Obama, Ia berfokuskan untuk membuat Irak menjadi negara yang aman dan stabil serta mampu memerangi keberadaan ISIS di Irak.

Pada masa kepemimpinan Barack Obama, negara Irak sendiri dipimpin oleh Jalal Talabani. Kedua pemimpin tersebut berusaha membuat ketegangan antara kedua negara tersebut tidak semakin memburuk. Dimana Obama dan Jalal Talabani

membuat suatu hubungan baik yaitu dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS di Timur Tengah yaitu di Irak dan Suriah. Dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS di Irak sendiri membuat kedua negara tersebut menjalin hubungan baik kembali.

Obama sendiri memiliki 4 strategi untuk melawan ISIS di Timur Tengah, diantaranya (Haryano, 2014):

- 1) Amerika Serikat melakukan serangan udara dengan Irak, guna melawan ISIS.
- 2) Amerika Serikat akan meningkatkan serangan daratnya bersama dengan pasukan Irak dan Kurdi, salah satu contohnya yaitu dengan mengirimkan 475 pasukan tambahan untuk menyerang ISIS.
- 3) Amerika Serikat akan terus mengandalkan kemampuan substansial kontra terorisme untuk mencegah serangan ISIS.
- 4) Amerika Serikat akan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap para warga sipil yang kehilangan tempat tinggalnya akibat ulah dri ISIS.

Dengan keterlibatan Amerika Serikat dalam memerangi ISIS di Timur Tengah membuat jumlah ISIS yang menyerang Irak dan Suriah berkurang. Teracatat sejak tahun 2014, Amerika Serikat sudah melancarkan serangan-serangan baik dari uara maupun darat kebeberapa pangkalan ISIS. Sedikitnya terdapat 50 ribu militan radikal ISIS tewas dalam serangan tersebut. Bantuan Amerika Serikat untuk Irak tidak berhenti disitu saja. Dibuktikan bahwa koalisi Amerika Serikat juga memberikan pelatihan militer serta menyalurkan persenjataan untuk pasukan lokal yang bertempur melawan ISIS. (Christiastuti, 2016)

4. Politik Luar Negeri Sudan Terhadap Amerika Serikat

Sudan dengan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Sudan pada tahun 1956. (U.S. State Department, 2018) Dan pada tahun 1967, Sudan memutuskan hubungannya dengan AS setelah dimulainya perang antara Arab dengan Israel. Hubungan kedua negara tersebut membaik kembali pada tahun 1971, ketika Partai komunis Sudan berusaha untuk menggulingkan Presiden Nimeiry. (U.S Embassy)

Pada tanggal 1 Maret 1973 terjadi peristiwa pembunuhan Duta Besar AS yaitu Cleo A. Noel oleh teroris Palistina yang berasal dari organisasi “Black September”. Pada peristiwa tersebut, para pejabat Sudan menanggapi kasus tersebut dengan cepat. Pejabat Sudan akhirnya menangkap dan mengadili para teroris dengan tuduhan pembunuhan. (U.S Embassy)

Namun pada bulan Juni 1974, pejabat Sudan memutuskan untuk membebaskan atau memindahkan para teroris ke tahanan pemerintahan Mesir. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Sudan, Amerika Serikat langsung merespon tindakan tersebut dengan menarik Duta Besar AS untuk Sudan. Walaupun pada akhirnya penarikan tersebut tidak berlangsung lama, dan Duta Besar dikembalikan lagi oleh Amerika Serikat di Khartoum. (U.S Embassy)

Pada bulan April 1986 hubungan Sudan dengan Amerika Serikat semakin memburuk, hal tersebut terjadi ketika AS mengebom Tripoli, Libya. Padahal pada tahun itu, Sudan merupakan negara di Afrika Sub Sahara yang menerima bantuan pembangunan dan militer terbesar dari Amerika Serikat. Setelah kerenggangan antara kedua negara tersebut, Amerika memutuskan untuk menghentikan bantuan yang diberikan untuk Sudan. (U.S Embassy)

Hubungan antara Sudan dengan Amerika Serikat semakin memburuk pada tahun 1990 an. Sudan

dianggap telah memihak Irak dalam perang teluk. Ditambah lagi kedekatan hubungan antara Sudan dengan organisasi teroris, hal tersebut juga menjadi faktor merenggangnya hubungan antara Sudan dengan Amerika Serikat pada tahun itu. Hubungan yang dari tahun ketahun semakin memburuk, akhirnya AS memutuskan untuk menghentikan kedutaan AS di Khartum. (U.S Embassy)

Amerika Serikat juga menuding bahwa Sudan merupakan negara yang memberikan sponsor terhadap teroris. Dan akhirnya puncak kerenggangan hubungan kedua negara tersebut yaitu saat Amerika Serikat memberlakukan ekonomi komprehensif, perdagangan serta sanksi keuangan untuk Sudan pada tahun 1997. (U.S Embassy)

Permasalahan antara Sudan dengan Amerika Serikat tak kunjung usai dari tahun ke tahun. Pada masa Sudan dipimpin oleh Omar Hassan al-Bashir, Sudan terlibat dalam konflik Dafur. Walaupun Sudan dan Amerika Serikat sering terlibat dalam suatu permasalahan, namun kedua negara tersebut terus berusaha untuk menjalin hubungan baik. Sudan selalu mengharapakan keterlibatan AS di Sudan dan terjalinnya hubungan baik dengan Amerika Serikat diharapkan mampu membantu Sudan dalam melawan kelompok teroris, mengakhiri ancaman-ancaman, dan terus mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat. (U.S Embassy)

5. Politik Luar Negeri Somalia Terhadap Amerika Serikat

Somalia menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada tahun 1960. (U.S. Department of State, 2018) Somalia merupakan negara yang sempat melewati perang dengan Euthiopia. Setelah perang yang terjadi antar dua negara tersebut berakhir pada tahun 1970 an, Somalia mulai beralih kenegara barat salah satunya adalah Amerika Serikat. Hal

tersebut dilakukan oleh pemerintahan Somalia guna untuk mendapatkan dukungan Internasional, peralatan militer dan bantuan ekonomi.

Perang saudara pada tahun 1980 yang terjadi di Somalia mengakibatkan runtuhnya pemerintah pusat Somalia pada tahun 1991. Sejak tidak berfungsinya pemerintah pusat Somalia, bentrokan-bentrokan klan maupun gerakan-gerakan Islam membuat Amerika dibawah kepemimpinan Bush mengatakan bahwa Somalia merupakan “haven of terrorism”. (Safitri I. A., 2014)

Sejak tahun 1990 an, Amerika Serikat telah menjadi salah satu negara yang ikut serta mengamankan Somalia dari berbagai ancaman. Tidak hanya bantuan dalam penjagaan keamanan, Amerika Serikat juga memberikan bantuan persenjataan yang diberikan oleh Hillary Clinton pada Agustus 2009. Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa pelatihan militer untuk pasukan pertahanan keamanan Somalia. (Safitri I. A., 2014)

Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberian bantuan terhadap Somalia tentu saja mempengaruhi eksistensi pengaruh Amerika Serikat di Somalia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemilihan Presiden Somalia yaitu Hassan Sheik Mohamed yang dilakukan secara langsung dan liberalisasi yang dibawa oleh Amerika Serikat. Hal ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat berhasil membawa nilai-nilai murninya secara politik. Walaupun hubungan Somalia dengan Amerika Serikat juga sempat tidak membaik selama 20 tahun pasca pertempuran Mogadishu. (Safitri I. A., 2014)

Lalu pada bulan Januari 2013 melalui Hillary Clinton Amerika Serikat mengakui pemerintah Somalia di Mogadishu, hal tersebut menjadi bukti bahwa hubungan bilateral antar kedua negara tersebut sudah membaik. (Furqon, 2013)

6. Politik Luar Negeri Yaman Terhadap Amerika Serikat

Hubungan dua negara antara Yaman dengan Amerika Serikat sudah terlihat sejak tahun 1946. Dimana hal tersebut ditandai dengan pengakuan AS atas kemerdekaan Yaman Utara pada tahun 1946. (U.S. Department of State, 2018) Lalu, hubungan kedua negara tersebut semakin terlihat pada tahun 1967 ketika Amerika mengakui atas kemerdekaan negara Yaman Selatan. Amerika merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Yaman Selatan.

Pengakuan-pengakuan yang diberikan AS untuk Yaman membuat kedua negara tersebut menjalin hubungan baik. Hubungan baik antara Yaman dengan AS ditandai pada tahun 1946 dengan penunjukan William A. Eddy untuk Yaman Utara sebagai kepala Misi Diplomatik Khusus AS ke Kerajaan Yaman. Lalu, pada tahun yang sama ditunjuklah Menteri AS untuk Kerajaan Yaman, serta pendirian kedutaan AS di Taiz pada tahun 1963. (U.S. Embassy)

Namun hubungan antara kedua negara tersebut juga mengalami pasang surut. Dimana pada bulan Juni 1967, Republik Arab Yaman (Yaman Utara) memutuskan hubungan dengan AS ditengah konflik Arab-Israel. Kerenggangan hubungan antara Yaman dengan AS tidak berlangsung lama, pada tahun 1972 kedua negara tersebut menjalin hubungan baik lagi dengan ditandai adanya kunjungan dari AS ke Sana'a oleh Menteri Luar Negeri AS pada saat itu yaitu William P. Rogers. (U.S. Embassy)

Sedangkan hubungan baik antar Yaman Selatan dengan AS ditandai dengan didirikannya kedutaan besar AS di Aden pada tahun 1967. Namun pada nyatanya kedua negara tersebut harus menerima kenyataan pada tahun 1969 hubungan kedua negara tersebut merenggang. Hal tersebut dibuktikan dengan penutupan Kedutaan AS di Aden. (U.S. Embassy)

Tahun 1990 hubungan Yaman Selatan dengan AS kembali terjalin, peristiwa tersebut diringi dengan penyatuan antara Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dengan Demokrasi Rakyat Yaman (Yaman Selatan) untuk kedua negara tersebut membentuk satu kesatuan yaitu “Republik Yaman”. Dan Ali Abdullah Saleh ditetapkan menjadi Presiden Yaman. (Durac, 2012)

Pada tahun 1994 Yaman terjadi perang saudara, perang tersebut terjadi akibat pertentangan antara kubu Utara dengan kubu Selatan. Dari tahun ke tahun konflik terus menimpa negara Yaman mulai dari perang saudara, konflik akibat dari ketegangan antara Houthi dengan Saleh dan konflik yang lain, tentu saja memperburuk keadaan Yaman dari tahun ketahun dan membuat krisis kemanusiaan di Yaman. (U.S. Department of State, 2018)

Karena dari tahun 1946 AS telah menjalin hubungan baik dengan Yaman, walaupun hubungan tersebut terus mengalami dinamika yang tidak mulus namun ketika melihat kondisi Yaman seperti itu AS turut membantu beban Yaman. Dimana bantuan tersebut berupa bantuan kemanusiaan, seperti makanan darurat, perawatan medis, dukungan vaksin untuk anak-anak, perlengkapan kebersihan dan sebagainya. (U.S. Department of State, 2018)

7. Politik Luar Negeri Libya terhadap Amerika Serikat

Libya dengan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik ssetelah kemerdekaan negara Libya pada tahun 1951 (Embassy of Libya). Pada masa kepemimpinan Raja Idris, Libya menjalin hubungan baik dengan negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika. (Mariansyah, 2017) Sedangkan pada masa kepemimpinan Muanmar Gaddafi, hubungan antara Amerika Serikat dengan Libya merenggang. Hal tersebut terjadi karena Gaddafi

menginginkan arah kebijakannya mengarah kepada Uni Soviet. (Eljahmi, 2006)

Masa kepemimpinan Gaddafi terjadi ketegangan antara Libya dengan Amerika Serikat. Ketegangan yang terjadi diantara kedua negara tersebut membuat Amerika Serikat menarik Duta Besar AS untuk Libya pada tahun 1972. Pada tahun 2011 Muammar Gaddafi digulingkan, Amerika Serikat pun terlibat dalam penggulingan kepemimpinan Gaddafi. (Embassy of Libya)

Setelah penggulingan kepemimpinan Gaddafi, Libya dengan Amerika Serikat kembali menjalin hubungan baik. Sejak penggulingan Gaddafi, Amerika Serikat berfokus untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dalam lembaga pemerintah Libya, mengembangkan masyarakat sipil dan memfasilitasi pemilihan umum yang bebas dan adil. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk mengamankan wilayah Libya dan memberikan bantuan yang ditargetkan untuk pembangunan Libya. (Embassy of Libya)

Hubungan baik antar kedua negara tersebut tentu saja berdampak pada kebaikan masing-masing negara. Dimana Libya mendapat keuntungan dengan hubungan baik antara Libya dengan Amerika Serikat, Libya mendapatkan banyak bantuan dari Amerika dalam banyak segi mulai dari bantuan keamanan negara, politik dan banyak yang lain.